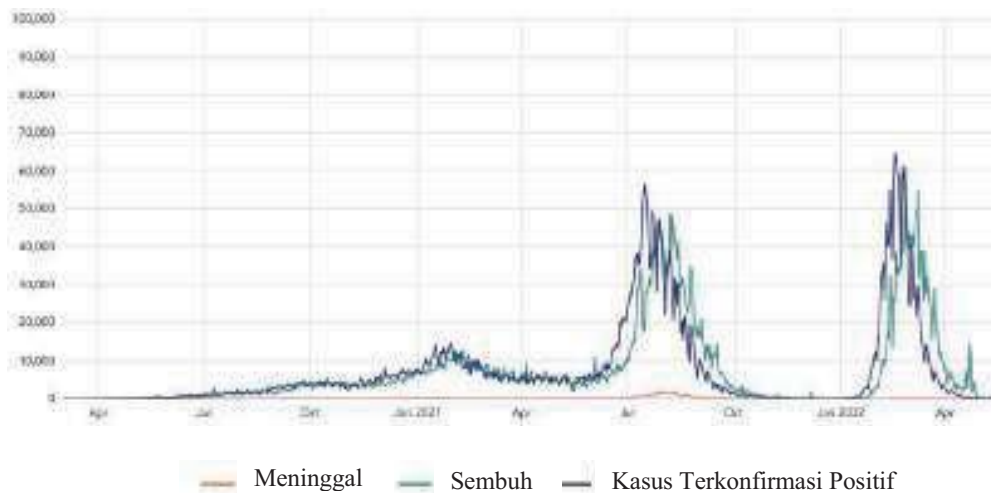


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merebak pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada paruh kedua 2019 kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kemudian menjadi masalah global. Sampai dengan akhir 2021, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) mencatat lebih dari 260 juta kasus terkonfirmasi positif, dan lebih dari 5 (lima) juta jiwa meninggal akibat COVID-19 di 227 negara (WHO, 2021). Sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan pada awal Maret 2020, hingga April 2022 Indonesia telah mengalami tiga gelombang besar pandemi COVID-19 (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021).

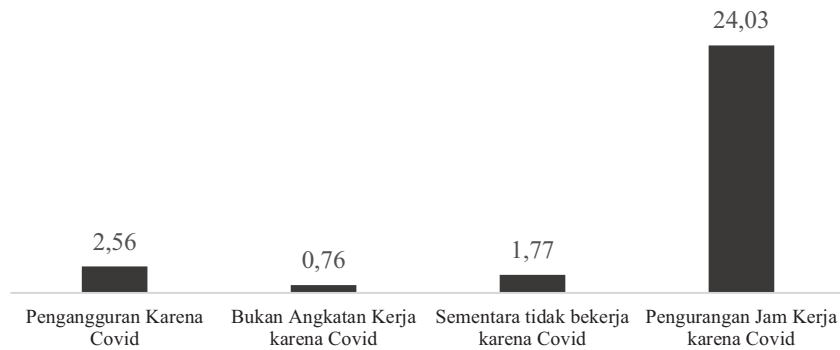


Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2022)

**Gambar 1.1 Tren Kasus Terkonfirmasi Positif, Sembuh dan Meninggal
Akibat COVID-19 di Indonesia**

Tingkat penyebaran dan kematian yang tinggi menjadi dasar pemerintah dari berbagai negara terdampak seluruh dunia melakukan kebijakan di sektor kesehatan seperti penutupan wilayah (*lockdown*) dan pembatasan sosial (*social distancing*) untuk mengurangi resiko penduduk terpapar. Di Indonesia, pemerintah mengumumkan status kedaruratan kesehatan masyarakat (Keppres Nomor 11 Tahun 2020) dan memberlakukan kebijakan *lockdown* di beberapa lokasi, dan himbauan tetap di rumah atau ‘*Stay at Home*’ melalui PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 hingga kebijakan akan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) demi memutus rantai penularan COVID-19 (INMENDAGRI No.15 Tahun 2021).

Penduduk dan tenaga kerja tidak dapat dipisahkan, sebab tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk. Merebaknya pandemi COVID-19 memberikan kejutan eksternal. Melemahnya kesehatan penduduk secara tiba-tiba, terutama penduduk usia kerja, merusak ketersediaan sumber daya manusia (Davidescu dkk., 2021). Tidak seperti krisis keuangan yang terjadi sebelumnya, krisis kesehatan akibat COVID-19 sangat berpengaruh pada pasar tenaga kerja khususnya dari sisi penawaran. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2020 terdapat sekitar 29,12 juta pekerja terdampak COVID-19 dan 2,56 juta di antaranya dinyatakan menganggur akibat COVID-19 (BPS, 2020b).



Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Terdampak COVID-19 per Agustus 2020 (juta Pekerja)

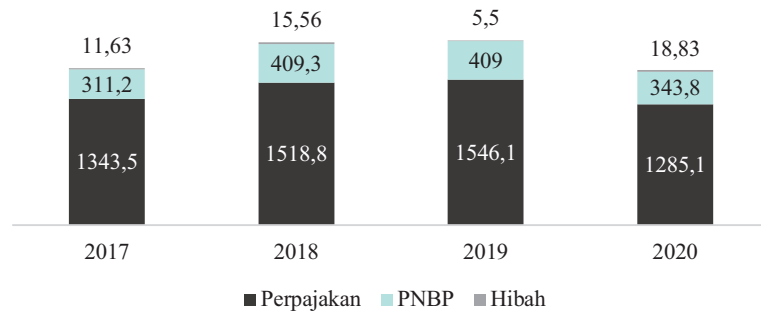
Sejalan dengan banyaknya pekerja terdampak COVID-19, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat pada Agustus 2020 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. TPT bertambah 1,84 persen poin pada Agustus 2020 (7,07 persen) dibandingkan Agustus 2019 di mana TPT sebesar 5,23 persen (BPS, 2020c).

COVID-19 hampir memukul semua sektor (Astuti dan Mahardhika, 2020). Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks ketika menyerang ekonomi terutama melalui faktor input pekerja. Pembatasan pergerakan manusia dalam beraktivitas berdampak pada pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, perusahaan atau bisnis, termasuk juga pemerintah. Hal tersebut berdampak melalui tenaga kerja pada pasar input yang kemudian memengaruhi pendapatan rumah tangga (Afiatno, 2021). Pendapatan pekerja yang berkurang akhirnya akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat. Selain itu, pemberlakuan *physical distancing* dan PSBB di

beberapa daerah di Indonesia juga berpengaruh pada pada operasional perusahaan. Permintaan pada pasar output terganggu akibat daya beli yang berkurang dan peraturan pembatasan. Sekitar 8,76 persen perusahaan di Indonesia berhenti beroperasi pada tahun 2020 dan 24,31 persen masih menjalankan usaha dengan pengurangan kapasitas baik jam kerja, mesin ataupun tenaga kerja (BPS, 2020a). Pengurangan jam kerja adalah opsi kebijakan yang banyak berlaku pada perusahaan/bisnis yang masih menjalankan usahanya. Selain pengurangan jam kerja, beberapa perusahaan juga memilih untuk merumahkan pekerja atau memberhentikan pekerja sebagai bentuk efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja bukan hanya mengurangi pendapatan pekerja atau rumah tangga namun juga mengurangi produktivitas atau kemampuan usaha/perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Sekitar 82,29 persen usaha menengah besar (UMB) dan 84,20 persen usaha menengah kecil (UMK) mengalami penurunan pendapatan. Selain perubahan operasional, penurunan pendapatan juga diakibatkan karena penurunan permintaan karena pelanggan/klien juga terdampak COVID-19 (BPS, 2020a).

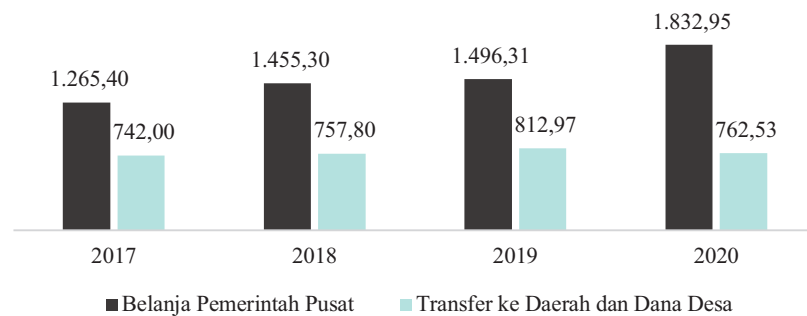
Yamali dan Putri (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa defisit perdagangan akibat penurunan daya beli dan pengangguran dapat merusak tatanan ekonomi. Meningkatnya jumlah pengangguran juga dapat mengakibatkan permasalahan pada neraca anggaran negara (Indayani dan Hartono, 2020). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dari Kementerian Keuangan RI, pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran (TA) 2020 mengalami penurunan 15,96 persen jika dibandingkan dengan TA 2019 sedangkan realisasi

belanja negara naik hingga 12,39 persen (lihat Gambar 1.3 dan Gambar 1.4) (Kementerian Keuangan RI, 2021b).



Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

Gambar 1.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah TA 2017-2020 (triliun Rupiah)

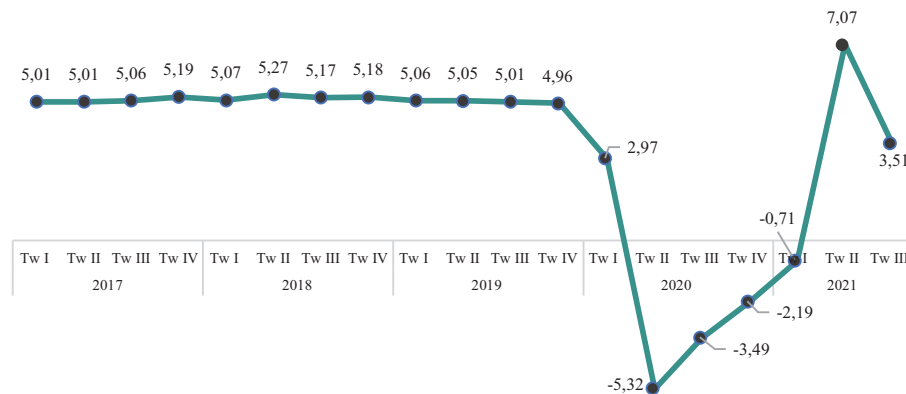


Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

Gambar 1.4 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2017-2020 (triliun Rupiah)

Pada masa COVID-19 perekonomian negara-negara di Asia khususnya negara berkembang seperti Indonesia mengalami tekanan berat. Kebijakan pembatasan pergerakan skala besar di berbagai negara telah menurunkan aktivitas ekonomi ke tingkat yang lebih rendah (Kementerian Keuangan RI, 2021b).

Paños dan Patón (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa COVID-19 adalah bencana alam baru, tidak seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya yang menghancurkan infrastruktur dan stok modal, namun adanya pandemi COVID-19 membuat beberapa sektor ekonomi terhenti. Sejak triwulan kedua tahun 2020, Indonesia terus mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat masuknya pandemi ini pada awal bulan Maret 2020 dan terus berlanjut hingga triwulan pertama tahun 2021 meskipun pada triwulan kedua tahun 2021 ekonomi Indonesia berhasil menunjukkan perbaikan dengan tumbuh sekitar 7,07 persen dibandingkan Agustus 2020 dan tetap tumbuh positif pada triwulan tiga tahun 2021 (BPS, 2021a).



Sumber: BPS (2021)

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulanan, 2017-2021(y-o-y)

COVID-19 merupakan keadaan baru yang penuh ketidakpastian. Minimnya referensi dan data perbaikan ekonomi, menyebabkan penyelesaian COVID-19 saat ini hanya mengandalkan keberhasilan vaksinasi dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Dalam rangka mengurangi keparahan dampak akibat COVID-19 pemerintah Indonesia telah melakukan Program Pengendalian COVID-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan penyesuaian postur APBN 2020 sebanyak dua kali melalui Perpres No 54 Tahun 2020 tanggal 3 April 2020 dan Perpres No 72 Tahun 2020 tanggal 24 Juni 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2021a). Perubahan tersebut menampung biaya PC-PEN yang di antaranya adalah kebijakan di sektor kesehatan melalui pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi hingga pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19, kemudian di sektor ekonomi, pemerintah memberi program perlindungan sosial, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi, dana sektoral Kementerian/Lembaga juga Pemerintah Daerah hingga relaksasi pajak baik pajak penghasilan, pajak tak langsung maupun bea impor. Dengan adanya kebijakan fiskal melalui APBN tersebut diharapkan dapat memitigasi dampak COVID-19 dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi berjalan efektif dan cepat terutama upaya peningkatan daya beli (Kementerian Keuangan RI, 2021b). Ditengah ketidakpastian akibat pandemi muncul pertanyaan apakah langkah pemerintah atau stimulus fiskal yang dihadirkan sudah merupakan prakiraan yang tepat dan hati-hati sesuai dengan sasaran.

Penelitian mengenai dampak COVID-19 telah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada satu masalah saja misalkan dampak COVID-19 akibat penurunan produktivitas tenaga kerja saja atau kebijakan fiskal secara umum. Oleh karena itu, peneliti menemukan celah untuk meneliti dampak COVID-19 melalui penurunan produktivitas pekerja sekaligus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 secara parsial baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi berurutan menurut kejadiannya. Melalui analisis input-output, penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah yang

dihadapi Indonesia. Instrumen tabel input-output yang digunakan adalah tabel I-O tahun 2016 dengan 52 subsektor lapangan usaha. Simulasi gegar (*shock*) baik dampak maupun kebijakan fiskal pada Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diterapkan baik dari sisi input primer (*supply*) maupun permintaan akhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pertanyaan penelitian yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja
2. Bagaimana dampak kebijakan fiskal di sektor kesehatan terhadap ekonomi (output) untuk mengatasi pandemi COVID-19.
3. Bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi (output) untuk pendapatan rumah tangga dan badan usaha/ entitas bisnis melalui insentif pajak langsung (subsidi pajak penghasilan) dan perlindungan sosial sebagai kompensasi penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi COVID-19.
4. Bagaimana dampak kebijakan fiskal melalui pengurangan pajak tak langsung terhadap ekonomi (output).
5. Bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi (output) sektor produksi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap tenaga kerja.

2. Menganalisis dampak kebijakan fiskal di sektor kesehatan terhadap ekonomi (output) untuk mengatasi pandemi COVID-19.
3. Menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi (output) untuk pendapatan rumah tangga dan badan usaha/ entitas bisnis melalui insentif pajak langsung (subsidi pajak penghasilan) dan perlindungan sosial sebagai kompensasi penurunan pendapatan masyarakat akibat pandemi COVID-19.
4. Menganalisis dampak kebijakan fiskal melalui pengurangan pajak tak langsung terhadap ekonomi (output).
5. Menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi (output) sektor produksi yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan prioritas dan evaluasi kebijakan pada masa COVID-19 di Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi baru dan menjadi pelengkap bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

1.5 Lingkup Penelitian

Beberapa cakupan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan tabel input-output 2016 dengan 52 (lima puluh dua) subsektor lapangan usaha.
2. Penelitian ini menganalisis dampak dan stimulus kebijakan pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020.

3. Dampak COVID-19 dilihat dari penurunan produktivitas tenaga kerja (sementara tidak bekerja dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja).
4. Kebijakan fiskal dilihat dari dua komponen, yaitu kebijakan fiskal untuk sektor kesehatan dan kebijakan fiskal untuk pemulihan ekonomi.

1.6 Sistematika Tesis

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan : bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 Tinjauan Pustaka: terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan model analisis.
3. Bab 3 Metode Penelitian: memaparkan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta Teknik pengolahan data.
4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan: memaparkan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian
5. Bab 5 Penutup: memaparkan simpulan, implikasi penelitian, keterbatasan, juga arah untuk penelitian selanjutnya.